

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MELAWI

Jalan Juang KM 2, Desa Paal

NANGA PINOH

KodePos 79672

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

ANTONI MANIK, SH. M.Hum.

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Melawi, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH.

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Kedua

KERALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KADIMANTAN BARAT

r. H. ADIYANI, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KEPALA UPT

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

WILAYAH MELAWI

NTONI MANIK, SH. M.Hum.

Pembina

P. 19740723 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH MELAWI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPH (RPHJP/RPHJPd) yang disahkan dan operasional	2 Unit
		Persentase luas Wilayah Tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	1.413 Ha
		Jenis komoditas HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	2 Jenis (gula aren dan Madu Kelulut)
		Jumlah produksi HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	Gula Aren : 1.200 kg Madu Kelulut : 120 Liter
		Jumlah unit persemaian yang dibangun dan dikelola oleh UPT KPH	1 lokasi
	d 15	Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT KPH	12.500 Batang
A CANANTA CONTRACTOR AND A CANANTA CAN		Persentase luas wilayah rawan karhutla dalam wilayah kelola KPH yang dikendalikan	41,57 %
2.	Meningkatnya akses kelola masyarakat terhadap pengelolaan hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan Perhutanan Sosial	25 Kelompok
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	5 Kelompok Tani Hautan

	Program	An	ggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp.	569.802.406	APBD Provinsi
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
2.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp.	2.789.014.033	APBD Provinsi
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Rp.	815.337.565	APBD Provinsi
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN			
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
	TOTAL	Rp	. 4.174.154.004	

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011

Pontianak, Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

WILAYAH MELAWI UPT KPH

ANTON MANIK, SH. M.Hum.

Pembina

19740723 200003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WIL. KETAPANG SELATAN

JL. LETKOL M. THOHIR NOMOR 11 B, Email : kphketapangselatan@gmail.com KETAPANG 78812

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Ir. BASUKI RACHMAT, MM

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang,

Januari 2021

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI CALIMANTAN BARAT

DINAS LINGIVUNGAN Y

Jr. H AMYANI, M.H

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011 Pihak Pertama

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG SELATAN

r. BASUKI RACHMAT, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670128 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH KETAPANG SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

10	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas	- Jumlah Koordinasi dan penyusunan	1 Dokumen
	pelayanan kantor	DPA-SKPD	
	position and the second	- Jumlah pentausahaan dan	1 Tahun
		pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	- Jumlah koordinasi dan penyusunan	18
		laporan keuangan bulanan	Dokumen
		/triwulan /semesteran SKPD	4 17 1
		- Jumlah penyediaan peralatan dan	1 Tahun
		perlengkapan kantor	1 /Dalassa
		- Jumlah ketersediaan peralatan	1 Tahun
		rumah tangga	1 Tahun
		- Jumlah ketersediaan barang cetakan	1 lanun
		dan penggandaan	1 Tahun
		- Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tanun
		- Jumlah ketersediaan jasa surat	1 Tahun
		menyurat	1 Tanan
		- Jumlah ketersediaan jasa	1 Reciver
		komunikasi,	1 Kilometer
		- Jumlah sumber daya air dan	1 Kwh
		- Jumlah listrik	
		- Persentase ketersediaan jasa	100 %
		pelayanan umum kantor	
		- Jumlah ketersdeiaan jasa	18 Unit
		pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	4 Unit
		pajak dan perizinan kendaraan	
		dinas operasional atau lapangan	
		- Jumlah pemeliharaan peralatan dan	2 Unit
		mesin lainnya	
		- Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi	1 Unit
		gedung kantor dan bangunan	
		lainnya	27
		- Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit/Bual
	Marin alastava Dangalalaan	- Jumlah tersusunnya Rencana	1 Unit
2.	Meningkatnya Pengelolaan	Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	(100%)
	Hutan	Hutan	,
		- Jumlah bibit yang tersedia	20.000 Bt
		- Jumlah bangunan persemaian	1 Unit
		- Jumlah terbentuknya Brigade	1 Regu
		Karhutla	
		- Jumlah Sapras operasional yang	1 Unit
		tersedia	
		- Jumlah Sapras pemadam karhutla	1 Unit
		dan kelengkapannya	
3.	Meningkatnya pemberdayaan	Jumlah pengembangan Perhutanan	10 LPHD
-	masyarakat	Sosial	

PE	Program	Anggaran	Keterangan
2. PR	ROGRAM PENUNJANG URUSAN EMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 788.063.022	APBD Provinsi
	ROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp. 2.400.000.000	DBH-DR/APBD Provinsi
PE	ROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, ENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN ASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Rp. 400.000.000	DBH-DR/APBD Provinsi
	TOTAL	Rp. 3.588.063.022	

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. H. ADI YANI, M.H. Fembina Utama Muda
NIP. 19670930 199403 1 011

Ketapang,

Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG SELATAN

Ir. BASUKI RACHMAT, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670128 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN **UPT KPH WILAYAH SEKADAU**

Jalan Merdeka Nomor 70 RT.01 RW.01 Desa Sungai Ringin SEKADAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

BAMBANG SUGIHARTO, S.Hut

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Sekadau Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekadau,

Januari 2021

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KPH WILAYAH SEKADAU

BANG SUGIHARTO, S.Hut

enata Tingkat I

NIP. 19700923 199203 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH SEKADAU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumalah RKA dan DPA	2 Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen Laporan Adminitrasi Keuangan	Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Laporan Keuangan	6 orang 3 Laporan
3.	Tersedianya kelengkapan Adminitrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah	1 Sertifikat
4.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Jumlah Pakaian khusus	4 orang 18 stel
5.	Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Alat Tulis kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga Jumlah barang cetakan dan Penggadaan Rapat koordinasi dan Konsultasi	23 jenis 3 jenis 5 jenis 4 orang
6.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tanah tapak kantor KPH	1 unit
7.	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah jasa Komunikasi, Air dan listrik Penyediaan Jasa Sewa gedung kantor	1 Tahun 1 Unit
8.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa perizinan kendaraan Dinas Jumlah unit kendaraan, operasional lapangan Jumlah pemeliharaan komputer dan Laptop	10 unit 2 Unit 7 buah
9.	Meningkatnya Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase luas wilayah tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	
	a. Meningkatnya Pengelolaan KPH melalui pembagiann Blok/Petak Pengelolaan	Persentase luas wilayah tertentu yang dikelola oleh KPH	
10.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi a. Meningkatnya Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimanfaatkan Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	Dokumen RPHJPd

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
	b. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan di KPH	Luas Hutan Produksi dan Hutan lindung yang dimanfaatkan	4 KTH
11.	Meningkatnya Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara a. Meningkatnya Rehabilitasi Lahan melalui Pengembangan Perbenihan	Persentase Penyediaan perbenihan tanaman hutan Persentase Penyediaan Perbenihan Tanaman hutan	2500 Bibit
12.	Terjaganya kelestarian kawasan hutan sesuai dengan fungsinya. Koordinasi, Sinkronisasi dan	Luas perlindungan hutan lindung dan hutan produksi	HL 67.919 Ha HP 64.506 Ha
	Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Anggota Brigade Jumlah Kendaraan Operasional Dalkarhutla dan Pamhut	18 Orang Roda 4 = 2 Unit Roda 2 = 8 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana serta Mebelair	13 Jenis
	 a. Kelestarian kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat terjaga melalui kegiatan patroli. b. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan. c. Terpenuhinya sarana dan prasarana serta mebelair kantor KPH. d. Terpenuhinya kebutuhan tenaga brigade dalkarhutla dan pamhut. e. Terawatnya kendaraan operasional dalkarhutla dan pamhut. 		
13.	Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS		3 desa
14.	a. Pembentukan kelompok b. Pemberdayaan usaha masyarakat. Pembinaan dan pelatihan Meningkatnya kesejahteraan	Jumlah kelompok tani hutan	3 kelompok
17.	masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan lindung Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah petugas pelaksana penyuluh kehutanan	o norompok

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
	a. Peningkatan dan pengembangan kelompok tani hutan b. Pembinaan dan pelatihan kelompok tani hutan		

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp. 738.612.631,-	APBD PROVINSI
2.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp. 1.990.402.349,-	DBH SDA Kehutanan – DR
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN	Rp. 400.000.000,-	DBH SDA Kehutanan – DR
4.	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PROGRAM PENGELOLAAN DAS	Rp. 263.521.989,-	DBH SDA- DR Kehutana
	TOTAL	Rn. 3.392.536.965.	

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. ADI VANI MH Pembina Utam Muda NIP. 19670930 199403 1 011 Sekadau,

Januari 2021

Pihak Pertama

KETANA IUPI KRH WILAYAH SEKADAU

AMBANG SUGIHARTO, S.Hut KUNGAP Penata Tingkat I NIP. 19700923 199203 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA

Jalan Gajah Mada No. 01 Lantai 2 Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Email : kphl.kapuashuluutara@gmail.com

PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

MARDIANSYAH,S.Hut

Jabatan

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu

Utara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

r. H. ADI YANI, M.H

Pembina Utama Muda

DINASLIA

NIP 19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN

HUTAN WILLAYAH KAPUAS HULU UTARA

MARDIANSYAH,S.Hut

NIP.19710322 200505 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPH (RPHJP/RPHJPd) yang disahkan dan operasional	1 Dokumen
		Persentase luas Wilayah Tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	Unit XIX 99,622 Ha Unit XVIII 78.472 Ha
	r	Jenis komoditas HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	Kelor, keratom,rotan jernang,jengkol petai, madu
		Jumlah produksi HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	7 komoditas
		Jumlah unit persemaian yang dibangun dan dikelola oleh UPT KPH	1 Unit
2.	Terjaganya Kawasan Hutan dari gangguan kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas	Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT KPH	22.000 btg
		Persentase luas wilayah rawan karhutla dalam wilayah kelola KPH yang dikendalikan	0,05 %
		Persentase Luas Kawasan Rawan Illegal Loging dalam wilayah kelola KPH yang dikendalikan	0.03 %
		Dokumen Laporan pelaksanaan Patroli	30 Laporan/ Dokumen
		Jumlah anggota Tim inti Brigdalkarhutla yang direkrut	15 Orang
3.	Meningkatnya akses kelola masyarakat terhadap pengelolaan hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan Perhutanan Sosial	9 Hutan Desa, 1 Hutan Adat
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	6 Kelompok
	*)		

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 906.925.000,-	APBD Provinsi
2.	Program Pengelolaan Hutan	Rp. 1.859.874.700,-	APBD /DBHDR Provinsi
3.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp. 611.885.300,-	APBD/DBHDR Provinsi

TOTAL

Rp. 3.378.685.000,-

Pihak Kedua KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINASLIA

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011

Pontianak, Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPTUKESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA

MARDIANSYAH,S.Hut

Penata Tingkat I

NIP 19710322 200505 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KPH WILAYAH KAYONG

JI Tanah Merah No 46 Sukadana 78852 Kabupaten Kayong Utara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

HENDARTO, S. Hut.T, M.Sc

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Kayong, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUR DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

r./H ADI YANI, M.H Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

WK WK

S.Hut.T, M.Sc

H KAYONG

mbina

002 198902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH KAYONG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPH (RPHJP/RPHJPd) yang disahkan dan operasional	1 unit
		Persentase luas Wilayah Tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	13,21 %
		Jenis komoditas HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	3 Jenis
		Jumlah produksi HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	pm
		Jumlah unit persemaian yang dibangun dan dikelola oleh UPT KPH	1 Unit
		Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT KPH	7.000 batang
		Persentase luas wilayah rawan karhutla dalam wilayah kelola KPH yang dikendalikan	196.475,78 Ha (62%)
2.	Meningkatnya akses kelola masyarakat terhadap pengelolaan hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan Perhutanan Sosial	3 Kelompok Baru
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	10 Kelompok
4.			

	Program	Α	nggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp.	1.831.783.212,-	APBD Provinsi
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Rp.	450.000.000,-	APBD Provinsi
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN			
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH	Rp.	118.216.788,-	APBD Provinsi
	ALIRAN SUNGAI (DAS)			
	TOTAL	Rp.	2.400.000.000,-	

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

r. H ADI YAN, M.H Pembina Utama Muda NIP 19670930 199403 1 011 Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

WILAYAN KAYONG

bina

%2 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KPH WILAYAH SINTANG UTARA

Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Sintang SINTANG

Email: kphstgutara17@gmail.com

Kode Pos 78611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

ANITA, S.Hut., MT

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Sintang Utara Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUF DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIWANTAN BARAT

embina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011 Pontianak, 04 Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT. KPH WHAYAH SINTANG UTARA

Pembina

NIP. 19700927 199703 2 000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH SINTANG UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang di susun sesuai SAP	100 %
3.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarasana tugas sesuai standar	100 %
4.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarasana tugas sesuai standar	100 %
5.		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarasana tugas sesuai standar	100 %
6.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %
7.	Meningkatnya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit persemaian yang dibangun oleh UPT KPH Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT	1 unit 21.500 btg
		KPH	21.500 btg
8.	Meningkatnya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Luas Wilayah rawan Karhutla dalam Wilayah Kelola KPH yang dikendalikan	30 %
		Luas Wilayah kelola KPH yang dilindungi / dicegah / di Batasi kerusakan Hutannya	90.093 ha
9.	Meningkatnya Pengelolaan	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan	5 dokumen
	Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	KPH (RPHJP/RPHJPD) yang disahkan dan operasional & dokumen perencanaan lainnya	perencanaa n
		Persentase luas Wilayah Tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	32 %
		Jenis Komoditas HHBK yang di Kelola oleh UPT KPH	2 Jenis Komoditas (Madu Kelulut & Kerajinan tangan
		Jumlah produksi HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	Madu : 400 Liter/tahun
10.	Meningkatkan akses kelola masyarakat terhadap pengelolaan Hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan Perhutanan Sosial	4 LPHD
11.	Meningkatnya	Jumlah kelompok masyarakat yang	43 KTH
	pemberdayaan masyarakat	diberdayakan	10 MPA

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp. 238.862.205	APBD Provinsi
	PEMERINTAHAN DAERAH		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp. 2.184.745.354	APBD Prov./DBH DR
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Rp. 127.424.380	APBD Prov./DBH DR
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN		
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
4.	Program Pengelolaan DAS	Rp.721.319.992	APBD Prov./DBH DR
	TOTAL	Rp. 3.775.505.499	

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

> Ir. H. ADI YANI, M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011

Pontianak, 04 Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT. KPH WILAYAH SINTANG UTARA

ANITA., S.Hut., MT

UPT KPH WILAYAH SINTANG

NIP. 19700927 199703 2 000



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KPH WILAYAH SINTANG TIMUR

Jalan DR Wahidin Sudirohusodo - Kode Pos 78611

SINTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIKO DIMUS, S.Hut, M.Si

NIP

: 19770907 200312 1 005

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Sintang Timur Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

NIP

19670930 199403 1 011

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Kedua KEPALA DINAS

DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ar. H. ADI YANI, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011 NIKO DIMUS, S. Hut,

Pembina

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH WILAYAH

SINTANG TIMUR

NIP. 19770907 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH SINTANG TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPH (RPHJP/RPHJPd) yang disahkan dan operasional	1. RPHJd KPHP Unit XIV 1 buku 2. RPHJd KPHP Unit XV 1 buku 3. RPHJPd KPHP Unit XVII 1 buku 4. RPHJP KPHL Unit XVI 1 Buku
		Persentase luas Wilayah Tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	17 %
		Jenis komoditas HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	5 Komoditas HHBK
		Jumlah produksi HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	5 Produksi HHBK
		Jumlah unit persemaian yang dibangun dan dikelola oleh UPT KPH	3 Hektar
		Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT KPH	30.000 Bibit
		Persentase luas wilayah rawan karhutla dalam wilayah kelola KPH yang dikendalikan	75 %
2.	Meningkatnya akses kelola masyarakat terhadap pengelolaan hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan Perhutanan Sosial	6 kelompok, (3 Hutan Desa dan 3 KTH)
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	6 kelompok, (3 Hutan Desa dan 3 KTH)

NO.	PROGRAM	1	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rp.	1.064.119.448	APBD Provinsi
2.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp.	283.982.587	APBD Provinsi
3.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Rp.	1.115.520.419	APBD Provinsi
4.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp.	686.377.544	APBD Provinsi
	TOTAL	Rp.	3.149.999.998	

Pontianak

Pontianak, Januari 2021

Pihak Kedua KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. H. ADI YANI, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011 Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH WILAYAH SINTANG TIMUR

NIKO DIMUS, S.Hut, M.Si

Pembina

NIP. 19770907 200312 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KPH WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR

Jl. Lintas Selatan No. 22.B Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu PUTUSSIBAU

Email: kphkhtimur.unitxx@gmail.com

Kode Pos 78714

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Euis Herawati, S.Hut

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 05 Januari 2021

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. H. ADI YANI, M.H. Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR

EUIS HERAWATI, S. Hut

Penata Tingkat I

NIP. 19800920 200312 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPH (RPHJP/RPHJPd) yang disahkan dan operasional	1 Dokumen
		Pemetaan Komoditas HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	3 Desa
		Pemetaan Jasa Lingkungan yang ada di UPT KPH	4 Desa
		Jumlah unit persemaian yang dibangun dan dikelola oleh UPT KPH	1 Lokasi
		Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT KPH	1050 Bibit Produktif
2.	Meningkatnya akses kelola	Jumlah kelompok masyarakat yang	2
	masyarakat terhadap	difasilitasi dalam penyiapan	Kecamatan
	pengelolaan hutan	Perhutanan Sosial	
3.	Meningkatnya pemberdayaan	Jumlah kelompok masyarakat yang	2
	masyarakat	diberdayakan	Kecamatan
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan Kehutanan serta Informasi Publik di Bidang Kehutanan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kehutanan yang berkualitas	1 Dokumen
5.	Menurunnya kerusakan sumber daya hutan serta meningkatnya keamanan hutan dan penegakan hukum di bidang kehutanan	Jumlah lokasi dan penanganan hutan dan penanganan tindak kejahatan di bidang kehutanan	2 Kecamatan

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp. 914.670.183	APBD Provinsi
	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp. 1.838.126.282	DBH SDA
			Kehutanan-DR
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	RP. 60.224.075	DBH SDA
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN		Kehutanan-DR
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH	Rp. 586.965.460	DBH SDA
	ALIRAN SUNGAI (DAS)		Kehutanan-DR
	TOTAL	Rp. 3.399.986.000	

Pontianak, 05 Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR

EUIS HERAWATI, S.Hut

UPT KPH WILAYAH KAPVAS KULUTU

Penata Tingkat I NIP. 19800920 200312 2 004

Pihak Kedua

KEPALADINAS LINGKUNGANADUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ADIYANI, M.H Ir. Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KPH WILAYAH KUBU RAYA

Jalan Prasetya Komp Korpri Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya KUBU RAYA

Email: kphkuburaya@gmail.com

Kode Pos 78391

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

M. ARI SUSANDI, S.Hut

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Kubu Raya Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. H. ADI YANI, M.H

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011 Pontianak, 04 Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT. KPH WILAYAH KUBU RAYA

M. ARI SUSANDI, S.Hut

Penata Tk. I

NIP. 19750607 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH KUBU RAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang di susun sesuai SAP	100 %
3.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarasana tugas sesuai standar	100 %
4.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarasana tugas sesuai standar	100 %
5.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarasana tugas sesuai standar	100 %
6.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarasana tugas sesuai standar	100 %
7.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPH (RPHJP/RPHJPd) yang disahkan	1 dokumen
		Jumlah Penyediaan Alat Ekonomi Produkstif dalam rangka pengembangan ekonomi/skema kerjasama oleh UPT KPH	5 unit
8.	Meningkatnya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit persemaian yang dibangun oleh UPT KPH	2 unit
		Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT KPH	20000 btg
9.	Meningkatnya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Karhutla serta Pengamanan Hutan oleh UPT KPH	100 %
10.	Meningkatnya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di	KPH	10 desa
	Bidang Kehutanan	Jumlah pemberdayaan masyarakat (agroforestry) oleh UPT KPH	10 paket

Program Anggaran Keterangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN 683.701.132 APBD Provinsi 1. Rp. PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 2.079.852.439 APBD Prov./DBH DR 2. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, Rp. 670.147.561 APBD Prov./DBH DR PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN TOTAL Rp. 3.433.701.132

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

> Ir. H. ADI KANI, M.H Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011

DINAS LINGKU

Pontianak, 04 Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT. KPH WILAYAH KUBU RAYA

M. ARI SUSANDI, S.Hut
Penata Tk. I

NIP. 19750607 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KPH WILAYAH SANGGAU TIMUR

Jalan Kom Yos Sudarso No. 32 Email : kphsgutimur@gmail.com SANGGAU-78512

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

ABDUL HARIS, S.Hut. MM

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Sanggau Timur Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KEPALA

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS LINGH DANK

Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT

H SANGGAU TIMUR PH WILAY

UPT KPH AYAH SANGGAU TIMI

GAN HIDUP DA

JL HARIS, S.Hut. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19711008 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH SANGGAU TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Tersedianya Penunjang	Jumlah RKA dan DPA yang disusun	4 Dokumen
	Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal : a. Perencanaan,	Jumlah Kinerja Perangkat Daerah yang di evaluasi	100 %
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang dilaksanakan	100 %
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	100 %
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang di adakan	29 stel
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan	100 %
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	100 %
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 %
	Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Jenis
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 %
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	100 %
		Jumlah Mebel yang diadakan	23 Unit
		Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100 %
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100 %
		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100 %
		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	11 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit, 1 Jenis
2.	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 Persil
3.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi yang dinilai	1 Unit
		Jumlah Pemanfaatan Hutan di KPH yang dilaksanakan	1 Tahun

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
3.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan	Jumlah Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan yang dikembangkan	1 Tahun
		Jumlah Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan	1 Tahun

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 603.582.400,-	APBD Provinsi
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 126.540.000,-	APBD Provinsi
3.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp. 2.919.900.000,-	DBH SDA Kehutanan - DR
	TOTAL	Rp. 3.650.022.400	,-

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEMUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pihak Kedua

r. H ADI VANY, M.H Pembina Utama Muda

DINAS LINGKUI

NIP. 19670930 199403 1 011

WILAYAH SANGGAU TIMUR

HARIS, S.Hut. MM Pembina Tk. I

NIP. 19711008 199803 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT

JalanGusti Dja'far Nomor 18 Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau TAYAN-78564

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

AMUNG HIDAYAT, SP, M.Si.

Jabatan

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak,

2021

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. H. ADI YANI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KEPALA KPH,

AMUNG HIDAYAT, SP, M.Si.

Pembina

NIP. 19690728 199103 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH SANGGAU BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan	2
	Hutan	KPH (RPHJP/RPHJPd) yang disahkan dan operasional	Dokumen
	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Persentase luas Wilayah Tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	1,20%
	20	Jenis komoditas HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	2 Jenis
		Jumlah produksi HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	200 Kg
		Jumlah unit persemaian yang dibangun dan dikelola oleh UPT KPH	2 Unit
		Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT	7.500
	2 5 5 5	KPH	Batang
		Persentase luas wilayah rawan karhutla dalam wilayah kelola KPH yang dikendalikan	50%
2.	Meningkatnya akses kelola	Jumlah kelompok masyarakat yang	3
	masyarakat terhadap pengelolaan hutan	difasilitasi dalam penyiapan Perhutanan Sosial	Kelompok
3.	Meningkatnya pemberdayaan	Jumlah kelompok masyarakat yang	2
	masyarakat	diberdayakan	Kelompok

Program

Anggaran

Keterangan

1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

Rp. 3.073.840.835,- APBD Provinsi

TOTAL

Rp. 3.073.840.835,-

Pontianak,

2021

Pihak Kedua

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DY YANI, M.H

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011 Pihak Pertama

KEPALA KPH WILAYAH SANGGAU BARAT

AMUNG HIDAYAT, SP, M.Si.

Pembina

NIP. 19690728 199103 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK

JALAN RAYA NGABANG-PONTIANAK KM.IV

NGABANG

Kode Pos 79357

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Ir. BURHANUDIN

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Landak Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 4 Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH WILAYAH LANDAK

Ir. BURHANUDIN

UPT KPH WIL

Pembina Tk. I NIP. 19670721 199403 1 006

Pihak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUF DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS LUGKUNGAN JOHD A

Ir. H. ADI VANI, M.H Pembina Utama Muda NIP 19670930 199403 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH LANDAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan Hutan KPH (RPHJP/RPHJPd) yang disahkan dan operasional	1 dokumen
		Persentase luas Wilayah Tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	10%
		Jenis komoditas HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	5 Jenis
	3-4	Jumlah produksi HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	
		Jumlah unit persemaian yang dibangun dan dikelola oleh UPT KPH	2 unit
		Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT KPH	20.000 btg
		Persentase luas wilayah rawan karhutla dalam wilayah kelola KPH yang dikendalikan	40%
2.	Meningkatnya akses kelola masyarakat terhadap pengelolaan hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan Perhutanan Sosial	5 kelompok
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	5 kelompok

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp.	520.410.125,-	APBD Provinsi
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
2.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp.	2.344.044.088,-	APBD Provinsi
3.	PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA	Rp.	67.996.866,-	APBD Provinsi
	ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Rp.	57.000.000,-	APBD Provinsi
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN			
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH	Rp.	892.029.011,-	APBD Provinsi
	ALIRAN SUNGAI (DAS)			
	TOTAL	Rp.	3.881.480.090,-	

Pontianak, 4 Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH WILAYAH LANDAK

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS LINGKI

r. H. AD YANI, M.H.

Pembina Utama wuuu NIP. 19670930 199403 1 011

GAVHID IT. BURHANUDIN

UPT KPH WILAY LANDAK

Pembina Tk. I

NIP. 19670721 199403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH BENGKAYANG

Jalan Raya Sanggau Ledo, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang **BENGKAYANG**

Email:upt.kph.wilayah.bengkayang@gmail.com

Kode Pos 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

HENRY OCTAVIUS K, S.Hut, M.M

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Bengkayang Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pibak Kedua

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIJUP DAN KEJUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. H. ADI YANI, M.H. Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH

Wilayah Bengkayang

HENRY OCTAVIUS K, S.Hut, M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19701003 199803 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH BENGKAYANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
11.	Terlaksananya Urusan	Tersedianya Dokumen Perencanaan,	100%	
	Pemerintahan Daerah Provinsi Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			
		Perangkat Daerah		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan	100%	
		Perangkat Daerah		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	
		Perangkat Daerah		
		Terlaksananya Administrasi Umum	100%	
		Perangkat Daerah		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik	100%	
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		
		Daerah		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
		Pemerintah Daerah	v.*	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik	100%	
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	71	
	Daerah.		74	
2.	Terlaksananya Konservasi	Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan	100%	
	Sumber Daya Alam Hayati	dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi		
	dan Ekosistemnya	dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran		
	=	(Appendix) CITES (Convension On		
		Species) untuk Kewenangan Daerah		
		Provinsi		
3.	Terlaksananya Pengelolaan	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata	100%	
	Hutan	Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade-In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan	100%	
Produksi dan Hutan Lindu	Produksi dan Hutan Lindung			
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawas	100%		
= =		Hutan Negara		
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan	100%	
		Lindung dan Hutan Produksi		
4.	Meningkatnya Wawasan dan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	100%	
	Peran Serta Masyarakat Di	Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di		
	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		

No.	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Anggaran		Keterangan
1.		Rp.	677.589.820,-	APBD Provinsi
2.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rp.	11.851.590,-	APBD Provinsi
3.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp.	2.492.996.020,-	DBH-DR
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Rp.	299.831.570,-	DBH-DR
	TOTAL	Rp.	3.482.269.000,-	

Pihak K

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMAYTAN BARAT

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011 Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH Wilayah Bengkayang

OCTAVIUS K, S.Hut, M.M.

Pembina Tk.I NIP. 19701003 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UPT KPH WILAYAH KAPUAS HULU SELATAN

Jalan Antasari No. 18 Putussibau Email: kphkh.sunit21@gmail.com

Kode Pos 78711

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: LAURENSIUS, SE

Jabatan

: Kepala UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN/HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. H. ADI YANI, MH Pembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

Pontianak, Januari 2021

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH WILAYAH KAPUAS HULU SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Pembina

NIP. 19690509 199103 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH KAPUAS HULU SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NzO ·	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan hutan melalui penyusunan Rencana tata hutan KPH dan pemanfaatan hutan di	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Hutan (RPHJPd) yang di sahkan dan operasional	1 Dokumen
	kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Jumlah dokumen pemantapan areal kerja	1 Dokumen
2.	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana prasarana pendukung persemaian KPH	1 Unit persemaian (1 paket sapras)
3.	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan, melalui peningkatan kapasitas kelompok dan bantuan sarana prasarana	1 kelompok usaha masyarakat (KUPS)
	pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan	Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terbina	3 Kelompok MPA
		Jumlah tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta operasionalnya	1 Regu (20 Orang)
		Jumlah lokasi patroli dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan dan pengamanan hutan	15 Kecamatan (115 Desa)
		Jumlah kelompok masyarakat yang di berdayakan dan di faslitasi sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas	1 Kelompok usaha masyarakat/KUPS
4.	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Jumlah kelompok masyarakat yang di fasilitasi sarana prasarana Jumlah kelompok pendampingan Perhutanan Sosial pasca izin	1 Kelompok , 10 LPHD
5.	Meningkatnya penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi melalui pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen /laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran	1 Dokumen

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 688.074.326,00	APBD Provinsi
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 46.680.000,00	APBD Provinsi
3.	Program Pengelolaan Hutan	Rp. 2.544.833.270,00	APBD Provinsi
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp. 96.177.404,00	APBD Provinsi
	TOTAL	Rp. 3.375.765.000,00	

Pontianak, Januari 2021

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. H. ADI YANI, MH Pembina Utama Muda

DINAS LIN DAN

NIP. 19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH WILAYAH KAPUAS HULU SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

> LAURENSIUS, SE Pembina

NIP. 19690509 199103 1 011



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN

UPT KPH WILAYAH MEMPAWAH

Jalan Raden Kusno Kabupaten Mempawah E-mail: <u>kehutanan mpw@yahoo.com</u> MEMPAWAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

YULIANSYAH, S.Hut

Jabatan

Plt Kepala UPT KPH Wilayah Mempawah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

Plt. Kepala KPH Wilayah Mempawah

Ir./H. ADI ANI, M.H

Pihak/Kedua

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS

Rembina Utama Muda

NIP. 19670930 199403 1 011

YULIANSYAH, S.Hut

Penata Tingkat I NIP.19680915 200801 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH MEMPAWAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Jumlah Rencana Pengelolaan F KPH RPHJPd yang disahkan operasional		1 Dokumen
		Persentase luas Wilayah Tertentu yang dikelola oleh UPT KPH	50 %
		Jenis komoditas HHBK yang dikelola oleh UPT KPH	6 Jenis
		Jumlah unit persemaian yang dibangun dan dikelola oleh UPT KPH	1 Buah
		Jumlah bibit yang diproduksi oleh UPT KPH	3700 bibit
		Persentase luas wilayah rawan karhutla dalam wilayah kelola KPH yang dikendalikan	100 %
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2 Penyuluh 4 Kelompok
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan Perhutanan Sosial	2 Kelompok
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	1 Tahun
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan	1 Tahun
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun

	Program		Anggaran	Keterangan	
1.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp. 1	1.809.004.744	APBD Provinsi	
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Rp.	663.115.056	APBD Provinsi	
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN				
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp	98.037.475	APBD Provinsi	X
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Rp.	189.334.400	APBD Provinsi	1
	DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN				X
	HIDUP				/
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	RP.	369.691.512	APBD Provinsi	
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

TOTAL

Rp. 3.129.183.187

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

Plt. Kepala KPH Wilayah Mempawah

ATIL

YULIANSYAH, S.Hut Penata Tingkat I NIP. 19680915 200801 1 008

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HALUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

> It. H. ADI YANI, M.H Fembina Utama Muda NIP 19670930 199403 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UPT KPH WILAYAH KETAPANG UTARA

Jalan Letkol M. Thohir No. 11 A . Email: kphketapangutara@gmail.com

KETAPANG 78812

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: R. HARTONO, S.Hut, MT.

Jabatan

Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Ir. H. ADI YANI, MH.

Jabatan

KepalaDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang,

Januari 2021

Pihak Kedua KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI/KALIMANTAN BARAT

MH embina Utama Muda

19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH WIL. KETAPANG UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UPT KPH WILAYAH KETAPANG

Penata Tingkat I NIP. 19820706 200903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya kegiatan menghadiri Undangan rapat dan pertemuan.	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Luar daerah.	4 Kegiatan
2.	Meningkatnya kelancaran Pelaksanaan Tugas di KPH.	2. Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor.	9 Paket.
3.	Terwujudnya kelancaran Pelaksanaan tugas Kantor.	3. Jumlah, Jenis Peralatan dan Perlengkapan Ruman Tangga.	4 Paket.
4.	A. Terlaksananya kegiatan operasional Kantor. B. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Kantor.	4. a. Jumlah Jasa PerijinanKendaraan Dinas.b. Jumlah Kendaraan Jabatan,Kendaraan Dinas/ Operasionalyang terpelihara.	43 Unit. 43 Unit.
5.	Berjalannya Operasional Kantor.	5. Jumlah makanan dan minuman.	7 kali/ Kegiatan
6.	Meningkatnya Pelayanan internal.	6. Jumlah Jasa Layanan.	2 Paket.
7.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor.	7. A. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan. B. Jumlah Jenis alat Tulis Kantor	2 Paket. 1 Paket.
8.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor.	8. Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Paket.
9.	Meningkatkan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas.	undangan. 9. Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	4 Orang.
10.	Meningkatnya kemampuan ASN dalam memahami Peraturan Perundang-undangan.	10. a. Jumlah Jasa Penatausahaan keuangan dan barang. b. Jumlah Materi dan Buku Cek.	2 Kegiatan. 1 Kegiatan.
11.	A. Terlaksananya kegiatan	11. a. Jumlah AC/Kipas Angin yang	6 Unit.
	kantor. B. Terlaksananya tugas-tugas kantor.	terpelihara. b. Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara.	11 Unit.
12.	Tersedianya pakaian Dinas dan Atribut.	12. Jumlah Pakaian Dinas/ Kerja dan Perlengkapannya.	2 Paket.
13.	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD.	13. Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD yang telah diasistensi.	18 Dokumen
14.	Tersedianya laporan keuangan (Bulanan, Triwulan, Semester, dan tahunan).	14. Jumlah Laporan Keuangan.	1 Buku.
15.	Terlaksananya Tugas Perkantoran.	15. Jumlah Pengiriman Surat Menyurat.	55 Paket.

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
16.	Meningkatnya kemampuan ASN sesuai tugas dan fungsi.	16. Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop.	2 Kegiatan.
17	Meningkatnya kapasitas Perencanaan dan konsultasi, evaluasi pelaksanaan pembangunan kehutanan.	17. Penyampaian dan Konsultasi Draft Rencana Kelola Unit XXVIII.	1 Kegiatan.
18.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan kehutanan serta informasi publik di bidang kehutanan.	18. Data sebaran pemukiman penduduk dan pembangunan sektor non kehutanan didalam kawasan hutan dalam rencana penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang Unit XXVIII KPHP Wilayah Ketapang Utara.	1 Kecamatan.
19.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan pada KPH dengan terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.	19. Penyusunan Dokumen RPHJP Unit XXVIII UPT. KPH Wilayah Ketapang Utara.	1 Dokumen.
20.	Meningkatnya Produksi dibidang Kehutanan.	20. Laporan Operasioanal KPH dalam Pelaksanaan pemanfaatan hutan di Unit XXVIII KPHP Wilayah Ketapang Utara.	1 Dokumen.
21.	Meningkatnya Produksifitas pada Kawasan Hutan Kritis.	21 Pelatihan Inokulasi Gaharu	Kegiatan/ Kecamatan.
22.	Terwujudnya Penghijauan diKawasan Hutan dan meningkatnya Pengelolaan Hutan Lestari.	21. Laporan Perbenihan pada Unit XXVI KPHP Wilayah Ketapang Utara.	5 Kecamatan.
23.	Menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan.	22. Laporan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla.	5 Kecamatan.
24.	Menurunnya intensitas kerusakan sumber daya hutan.	23. Laporan Perlindungan dan Pamhut.	5 Kecamatan.

NO	KEGIATAN		ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	36,320,000,00.	APBD Provinsi
2.	Penyediaan Peralatan dan Perleng kapan Kantor.	Rp.	106,377,738,00.	APBD Provinsi
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Rp.	4,899,949,00.	APBD Provinsi
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas.	Rp.	91,308,825,00.	APBD Provinsi
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp.	10,500,000,00.	APBD Provinsi
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp.	35,672,000,00.	APBD Provinsi
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Rp.	6,332,375,00.	APBD Provinsi
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Rp.	5,000,000,00.	APBD Provinsi APBD Provinsi
9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Rp.	8,968,000,00.	APBD Provinsi
10.	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Rp.	94,950,000,00.	APBD Provinsi
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Lainnya.	RP.	10,925,550,00.	APBD Provinsi
12.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Rp.	42,620,850,00.	APBD Provinsi
13.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD.	Rp.	19,606,849,00.	APBD Provinsi
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp.	21,495,480,00.	APBD Provinsi
15.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	998,819,00.	APBD Provinsi
16.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Rp.	23,800,000,00.	APBD Provinsi
17.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Rp.	37,682,656,00.	APBD Provinsi
18.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Lindung.	Rp.	104,440,729,00.	APBD Provinsi
19.	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Rp.	500.000,000,00.	DBH-DR

20.	Pelaksanaan Pemantaatan Hutan di KPH.	Rp.	746,663,592,00.	DBH-DR
21.	Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS.	Rp.	431,799,124,00.	DBH-DR
22.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan.	Rp.	417,511,250,00.	DBH-DR
23.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Rp.	423,679,592,00.	DBH-DR
24.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.	Rp.	366.390,900,00.	DBH-DR

TOTAL

Rp. 3,547,894,278,00

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir./H. ABI YANI, MH.

DINAS LIN

Pembina Utama Muda NIP. 19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KEPALA UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Ketapang, Januari 2021

WILAYAH KETAPANG UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN PROMINET MALIMANTAN BARAT

WILAYAF KETAPAN

HARTONO, S.Hut., MT.

Penata Tingkat T WIP 19820706 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KPH WILAYAH SAMBAS

Jalan Pendidikan Tumuk Manggis email :kph.sambas@gmail.com S a m b a s

Kode pos 79462

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

PONTY WIJAYA, S. Hut. MM.

Jabatan

Kepala UPT KPH Wilayah Sambas Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

Ir. H. ADI YANI, MH

Jabatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Kedua

KEDALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

r. H. ADI YANI, M.H. Pembina Utama Muda

NIR./19670930 199403 1 011

Pihak Pertama

KEPALA UPT KPH WILAYAH SAMBAS

PONTY WIJAYA, S. Hut., MM

Pembina

NIP. 197306012000031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UPT KPH WILAYAH SAMBAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas	Terlaksananya Perencanaan,	19
	penyusunan perencanaan	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen
	kinerja dan keuangan dan	Perangkat Daerah	
	laporan kinerja PD		
2.	Meningkatnya kualitas	Terwujudnya Pelaksanaan	100 %
	penyusunan perencanaan	Administrasi Keuangan Perangkat	
	kinerja dan keuangan dan	Daerah	
1/-	laporan kinerja PD		
3.	Meningkatnya kualitas	Terwujudnya Pelaksanaan	100 %
	penyusunan perencanaan	Administrasi Keuangan Perangkat	
	kinerja dan keuangan dan	Daerah	
	laporan kinerja PD		
4.	Persentase pelayanan	Terwujudnya Administrasi	1 Tahun
	administrasi kepegawaian	Kepegawaian Perangkat Daerah	
	sesuai prosedur		
5.	Persentase pemenuhan	Terwujudnya Administrasi Umum	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Perangkat Daerah	
	prasarana tugas sesuai		
	standar		
6.	Persentase pemenuhan	Terwujudnya Administrasi Umum	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Perangkat Daerah	
	prasarana tugas sesuai	3	
	standar		
7.	Persentase pemenuhan	Terwujudnya Administrasi Umum	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Perangkat Daerah	1 100110111
	prasarana tugas sesuai	8	
	standar		
8.	Persentase pemenuhan	Terwujudnya Administrasi Umum	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Perangkat Daerah	
	prasarana tugas sesuai	8	
	standar		
9.	Persentase pemenuhan	Terwujudnya Administrasi Umum	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Perangkat Daerah	
	prasarana tugas sesuai		
	standar		
10.	Persentase pemenuhan	Terlaksananya Penyediaan Jasa	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Penunjang Urusan Pemerintahan	
	prasarana tugas sesuai	Daerah	
	standar		
11.	Persentase pemenuhan	Terlaksananya Penyediaan Jasa	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Penunjang Urusan Pemerintahan	
	prasarana tugas sesuai	Daerah	
	standar		
12.	Persentase pemenuhan	Terlaksananya Penyediaan Jasa	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Penunjang Urusan Pemerintahan	
	prasarana tugas sesuai	Daerah	
	standar		
13.	Persentase pemenuhan	Terlaksananya Pemeliharaan	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Barang Milik Daerah Penunjang	
	prasarana tugas sesuai	Urusan Pemerintahan Daerah	
	standar		
14.	Persentase pemenuhan	Terlaksananya Pemeliharaan	1 Tahun
	kebutuhan sarana dan	Barang Milik Daerah Penunjang	
	prasarana tugas sesuai	Urusan Pemerintahan Daerah	
	standar		

NO	SASARAN PROGRAM	INDAKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
15.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	Barang Milik Daerah Penunjang	1 Tahun
16.	Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	3 3 3	1 Tahun
17.	Persentase Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang mendapat pengesahan	Terwujudnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1 Tahun
18.	Luas perlindungan di HP dan HL	Terwujudnya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun
19.	Persentase penyediaan perbenihan tanaman hutan	Terwujudnya Perbenihan Tanaman Hutan	1 Tahun
20.	Jumlah petugas pelaksana penyuluhan kehutanan	Terwujudnya Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Tahun

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp. 659.023.203,00	APBD Provinsi
	PEMERINTAH DAEARAH PROVINSI		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp. 2.293.272.517,00	APBD Provinsi
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,	Rp. 400.000.000,00	APBD Provinsi
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN		
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
	TOTAL	Rp. 3.352.295.720,00	APBD Provinsi

Pihak Kedua

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pembina Utama Muda NIP 19670930 199403 1 011

Pontianak,

Januari 2021

Pihak Pertama

WEPALA UPT KPH WILAYAH SAMBAS

PONTY WIJAYA, S. Hut., MM

Pembina

NIP. 197306012000031007